



Evaluasi Program Pemerintah Tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Ismail¹, Bagus Ananda Kurniawan², Poppy Abellya Zalzabilla³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v2i2.99>

CORRESPONDENCE

E-mail: poppyzalzabilla1538@gmail.com

KEYWORDS

Policy implementation, child-friendly cities, government

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the government's child-friendly program in the city of Surabaya in making Child-Friendly Districts (KLA), supporting factors and inhibiting factors faced by the Surabaya City Government and the impact of the Government's program on child-friendly. The research method used is descriptive qualitative. The location of this research is at the Population Control, Women's Empowerment and Child Protection Office (DP5A) of Surabaya City and Three (3) sub-district areas that are pillars of the project (Genteng Sub-district Office, Wonocolo Sub-district, Benowo Sub-district), with the research subject being the Head of DP5A Surabaya City, Head of the People's Welfare and Economic Section in each sub-district area. The focus of this research is the Implementation of the Government's Child Friendly Program, the supporting and inhibiting factors faced by the Surabaya City Government and the impact of the Government's Child Friendly program. Sources of information were determined using purposive sampling techniques, data collection techniques through observation, interviews and documentation and data analysis techniques with data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that: (1) Implementation of the Government Program on Child Friendly in Surabaya City. (2) The influencing factors are in accordance with the objectives of the activities that have been set. (3) The impact is that the cooperation that is established is quite effective, problem solving is fast, precise and straightforward, the achievement of activity results is enough to help the government in solving cases of child problems.

PENDAHULUAN

Anak sebagai cikal bakal penggerak dan pemimpin yang akan sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa mendatang. Layaknya sebuah investasi bagi suatu negara, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan, pembentukan serta pengembangan bagi masing-masing individu sebab nantinya masa depan negara berada di tangan mereka, sebagai anak mudanya. Sehingga, apabila telah mempersiapkan pewaris

bangsa yang berkualitas tentu akan berkorelasi dan berimplikasi terhadap bagaimana suatu negara di masa yang akan datang.

Pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak menjelaskan bahwa anak ialah individu yang belum berumur 18 tahun, tergolong anak yang masih dalam kandungan. Anak yang belum berumur 18 tahun masih rawan terhadap masalah sosial. Seperti eksplorasi terhadap anak, dimana anak yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah malah dipaksa untuk ikut mencari nafkah dan akhirnya putus sekolah. Banyak contoh yang dapat kita temukan seperti meminta di lampu merah, mengamen, menjual koran, tisu dan lainnya sampai larut malam. Termasuk kejadian lainnya kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, anak yang berhadapan dengan hukum, HIV/AIDS, pelecehan seksual, perdagangan manusia, pernikahan dini, dan lainnya.

Melihat kondisi di atas melalui konvensi anak tanggal 5 September 1990, Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak. Hal ini juga sudah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tanggal 10 Mei 2002 ketika sidang PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke-27 khusus mengenai anak, Indonesia ikut serta dalam menandatangani World Fit For Children Declaration (WFC) atau disebut juga sebagai Deklarasi Dunia Layak Anak (DLA). Kemudian tahun 2004 Indonesia mulai menuangkan "Program Nasional Bagi Anak (PNBAI)". Program ini menjadi acuan bagi stakeholder dalam proses pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia.

Melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) telah merintis pembentukan Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 dengan menyiapkan aturan pelaksanaan untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten atau kota Layak Anak (KLA) ialah bentuk program tingkat kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan dengan basis hak anak dengan pengintegrasian sumber daya dan komitmen pemerintah, swasta dan warga, yang direncanakan dengan komprehensif dan berkelanjutan pada program, kebijakan dan aktivitas agar dapat memberikan jaminan tercukupinya hak anak.

Pengembangan KLA umumnya memiliki tujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kota atau kabupaten yang mengarahkan kepada usaha perubahan konsepsi hak anak pada program, kebijakan, atau aktivitas untuk memberi jaminan tercukupinya hak anak pada kabupaten/kota (Saputra, 2019:26). Apresiasi pelaksanaan KLA pada kabupaten/kota diberikan dengan lima kategori peringkat yaitu 1. KLA, 2. Utama, 3. Nindya, 4. Madya, dan 5. Pratama. Kabupaten/Kota yang berada di Negara Indonesia mulai mengembangkan KLA untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak tahun 2030.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenppa) pada tahun 2021 mereka memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kepada 275 Kabupaten/Kota. Kota Surabaya merupakan salah satu dari 3 kota atau kabupaten lainnya seperti Kota Yogyakarta, Kota Denpasar dan Kota Surakarta yang memperoleh penghargaan KLA pada kategori Utama (Yesayabela et al., 2023).

Berdasarkan pencapaian prestasi tersebut tentunya komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan program Kota Layak anak (KLA) menjadi perhatian utama. Dalam pelaksanaan sebuah program, tentunya banyak ditemukan masalah-masalah yang mungkin beberapa diantaranya belum ditemukan solusi pemecahan masalah tersebut, maka dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian tentang "Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya". Adapun rumusan masalah penelitian ini, yaitu Bagaimana implementasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya, dan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya, serta adakah dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya.

Tujuan dari penelitian yaitu, menganalisis implementasi program pemerintah layak anak di kota Surabaya dalam menjadikan Kota Layak Anak (KLA), menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya dalam menjadikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Manfaat penelitian yaitu, hasil penelitian ini merupakan penerapan disiplin ilmu yang telah ditempuh selama proses perkuliahan, dengan realitas yang terjadi di lapangan kerja untuk dipadukan. Sehingga penelitian ini dapat digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang ada dalam memahami tentang evaluasi program pemerintah tentang layak anak di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif ini menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan (Creswell & Creswell, 2017). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan (wawancara) dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan, atau narasumber (Musleh, 2023). Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pemerintah tentang Layak Anak , pada penelitian ini menggunakan teori George C. Edwards yang memiliki 4 aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi.

Teknik menganalisis data secara induktif merupakan analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat

dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti (Musleh et al., 2023). Memverifikasi data atau menafsirkan, menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti. Kegiatan analisis berikutnya yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Hasil penelitian ini akan dideskripsikan melalui 4 aspek dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

Komunikasi

Proses komunikasi yang berjalan dapat melalui berbagai pintu sesuai dengan prinsip dasar KLA yang tertuang dalam UU KHA. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) selaku wakil ketua gugus tugas Kota Layak Anak telah melaksanakan tugasnya secara maksimal, dengan memberikan informasi melalui media hotline PPA, pelatihan KHA untuk ASN, tenaga kesehatan, sosialisasi pada kepala OPD, Lurah dan Camat yang juga ikut turun andil dalam hal ini. Penyampaian kritik dan saran dapat disampaikan langsung ketika ada sosialisasi, dan secara tidak langsung juga dapat disampaikan melalui media pelaporan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya.

Sumber Daya

Seluruh stakeholder menjadi bagian dalam program Pemerintah tentang Layak Anak. Dalam memaksimalkan kegiatan ini dibutuhkan kerjasama dengan beberapa instansi. Misalnya sebagai contoh, Dinas Sosial sebagai instansi yang dapat membantu warga yang kurang mampu untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, kemudian Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai instansi yang bekerja sama dengan program PUSPAGA dalam membantu memberikan pembelajaran secara akademik maupun non-akademik.

Sumber dana yang digunakan dalam kegiatan Layak Anak berasal dari dana APBD. Dimana dana tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan program diantaranya sarana dan prasarana seperti contoh pemberian amunisi dan nutrisi bagi balita stunting dan ibu menyusui. Kemudian untuk dana diluar perencanaan dapat berasal dari iuran pribadi maupun swadaya.

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Layak Anak adalah sampai berbagai tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal serta segala permasalahan yang difokuskan kepada anak bisa terselesaikan dengan tuntas, khususnya di Kota Surabaya. Maka dari itu juga dibutuhkan lebih dari 1 stakeholder untuk menunjang pelaksanaan program serta tersedianya anggaran khusus untuk kepentingan anak, agar tujuan kecamatan layak anak tercapai, mengingat anggaran APBD sangat minim untuk mengentaskan permasalahan di klaster 3 terkait kesehatan dan kesejahteraan.

Disposisi

Terjalin komitmen yang baik. Hal ini ditandai dengan saling menerima pendapat satu sama lain, dan tidak meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Ketika ada kendala maupun hambatan mereka selalu mendiskusikan untuk menemukan jalan keluarnya. Evaluasi pun diadakan setiap kurang lebih 3bulan sekali. Para stakeholder yang menjalankan selalu bekerja dengan hati dan berkomitmen untuk tetap membantu dalam proses kebijakan pengembangan Kota Layak Anak.

Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di dalam kegiatan Layak Anak tidak berbelit karena jika dilihat dari bawah maka informasi dari tingkat kelurahan dan kecamatan akan diteruskan kepada pengelola program, kemudian akan dilanjutkan kepada pimpinan. Apabila memerlukan bantuan dari dinas yang lain misalnya Dinas Sosial maka akan dihubungkan kepada dinas terkait. Sedangkan untuk Standar Operasional Prosedur terdapat pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Mengenai Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Selain itu pada peraturan tersebut juga terdapat dasar pelaksanaan kegiatan Layak Anak yaitu, UUD 1945 pasal 28 B ayat 2, Undang-undang 35/2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang 23/2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 21), serta Perpres 25/2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Berikut ini merupakan faktor pendukung menurut D.L. Weimer dan Aidan R.Vining (1999;38) dalam Pasolong (2010;59) terdapat 3 faktor pendukung yaitu, Logika, Hakikat Kerjasama, dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia.

Logika

Kegiatan Layak Anak ini telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dicontohkan dengan meningkatnya angka keberhasilan penurunan stunting di Kota Surabaya. Meskipun masih sering ditemukan hambatan/kendala namun para stakeholder selalu berusaha untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin.

Hakikat Kerjasama

Kerja sama yang dilakukan antara pelaksana kegiatan sudah cukup baik. Namun, masih ditemukan beberapa masalah kecil yang wajar terjadi, seperti kesalahpahaman dan perbedaan pendapat satu sama lain. Kerja sama merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Apabila kerja sama yang terjalin kurang maksimal maka kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Komitmen yang terjalin cukup baik. Hal ini ditandai dengan saling memberikan loyalitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu para stakeholder saling membantu satu sama lain.

Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat pelaksanaan kebijakan menurut Bambang Sunggono terdapat 4 faktor, yaitu Isi Kebijakan, Informasi, Dukungan, dan Pembagian Potensi:

Isi Kebijakan

Program Layak Anak yang disampaikan para stakeholder menggunakan komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat di Kota Surabaya. Selain dengan pendampingan korban, mereka juga memberikan berdiskusi kecil dengan masyarakat. Para stakeholder juga meminta kerja sama dengan masyarakat apabila ada kerabat atau tetangga yang mengalami permasalahan anak di sekitar mereka agar segera melaporkan ke pihak yang berwenang.

Hal ini juga akan membantu penyelesaian angka kejahatan dan kekerasan anak di kota Surabaya yang tanpa kita sadari saat ini Surabaya mendapat predikat Kota Layak Anak Kategori Utama.

Informasi

Dalam konteks hubungan komunikasi antar stakeholder yang berjalan selama ini tentu terdapat masalah meskipun tidak sering. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor usia, pola pikir, sifat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam penggunaan media komunikasi online, terkadang ada salah satu anggota yang tidak dapat menggunakan dengan maksimal, yang mengakibatkan tidak mendapatkan informasi secara jelas. Namun, di samping itu komunikasi yang terjalin sudah efektif, karena apabila ada suatu masalah maka akan cepat didiskusikan dan dicari jalan keluarnya secara bersama.

Dukungan

Dukungan yang berasal dari masyarakat di Kota Surabaya tentu sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan kegiatan program pemerintah tentang layak anak. Dukungan tersebut dapat berupa peran serta kader masyarakat dalam satgas dan juga peran RT, RW, LPMK dan tokoh masyarakat. Yang dimana, masyarakat sangat mendukung akan hal ini, dan mereka memberi fasilitas serta menanggapi dengan respon yang positif.

Pembagian Potensi

Pembagian tugas harus dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Dalam hal pembagian tugas antar stakeholder sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing staff. Sehingga, kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Dampak Evaluasi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya

Evaluasi kebijakan publik menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Secara normatif, fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, terlebih pada masa masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan evaluasi formatif menurut William N. Dunn (1999:609), yang terdiri dari 7 aspek-aspek kinerja yang harus dievaluasi.

Efektivitas

Kegiatan layak anak ini sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan melalui kerjasama yang terjalin baik antar pelaksana dalam mendukung tercapainya program layak anak. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) cukup terbantu dengan adanya para stakeholder tersebut. Melalui para stakeholder maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan KLA yaitu menjadikan wilayah yang ramah anak.

Efisiensi

Efisiensi dalam pelaksanaan tidak berbelit-belit dan cukup tepat dalam penyelesaian masalah. Misalnya untuk mengatasi permasalahan pada anak yang kekurangan dalam faktor ekonomi maka akan segera dilaporkan dan dihubungkan kepada Dinas Sosial agar diberikan bantuan pemakanan dan bantuan sosial lainnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kira-kira membutuhkan waktu paling lambat 1 bulan. Selain itu, para stakeholder

juga membantu anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan akan dihubungkan ke Dinas Pendidikan, agar si anak tersebut tetap dapat menyelesaikan pendidikannya.

Kecukupan

Hasil yang diinginkan dari berjalannya kegiatan ini yaitu Kota Surabaya tuntas dalam hal permasalahan terkait anak. Dari pernyataan beberapa narasumber tersebut dapat dianalisa bahwa, pencapaian kegiatan Layak Anak ini cukup membantu pemerintah untuk mencapai predikat sebagai Kota Layak Anak. Memang kasus di Kota Surabaya belum berkurang secara drastis, namun setidaknya sudah ada peningkatan angka keberhasilan dalam kegiatan ini.

Perataan

Program Layak Anak telah tersebar secara merata di seluruh kota Surabaya. Terlebih tidak hanya berpangku pada 1 stakeholder saja melainkan beberapa instansi ikut andil di dalamnya, hal ini tentunya semakin memudahkan dalam pengentasan permasalahan terkait anak di kota Surabaya.

Responsivitas

Masyarakat sangat menerima adanya pelaksanaan kegiatan Layak Anak dan masyarakat juga memberikan respon yang positif untuk kegiatan ini. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat memperoleh pengetahuan lebih lanjut tentang pemenuhan hak anak. Selain itu masyarakat juga menjadi peka dan peduli terhadap keadaan sekitar. Dampak yang dihasilkan dari program layak anak kepada masyarakat tentunya adalah semakin meratanya pembangunan yang ramah anak pada infrastruktur serta semakin banyaknya program kegiatan yang ramah anak sehingga banyak anak yang mendapatkan manfaat dari hal tersebut.

Ketepatan

Kegiatan Layak Anak yang saat ini sedang berjalan sudah cukup sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan melalui berkurangnya angka permasalahan yang terjadi pada anak di kota Surabaya.

KESIMPULAN

Dalam implementasi program Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya baik dari segi komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat melalui berbagai pintu, misalnya media sosial, sosialisasi, pengaduan, dan kotak suara yang tersedia dan disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat diatasi hanya dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, maka diperlukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Kemudian, sumber dana yang dikeluarkan untuk kegiatan Layak Anak berasal dari APBD, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan iuran antar pelaksana kegiatan apabila dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Layak Anak adalah sampai berbagai tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan maksimal serta segala permasalahan yang difokuskan kepada anak bisa terselesaikan dengan tuntas. Dalam kegiatan ini terjalin sikap komitmen yang baik antar pelaksana kegiatan Layak Anak dan tidak berbelit.

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Pemerintah tentang Layak Anak di Kota Surabaya. Kegiatan Layak Anak yang berjalan telah sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah ditetapkan serta kerjasama yang terjalin antar pelaksana sudah baik, namun masih ditemukan beberapa kendala/hambatan yang wajar terjadi, seperti perbedaan pendapat. Dalam kegiatan ini para pelaksana memiliki komitmen dan loyalitas yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Para stakeholder juga meminta kerja sama dengan masyarakat apabila ada kerabat atau tetangga yang mengalami permasalahan. Komunikasi yang terjalin sudah efektif dalam penyampaian informasi karena apabila ada suatu masalah maka akan cepat didiskusikan dan dicari jalan keluarnya, serta masyarakat kota Surabaya merespon positif dengan adanya kegiatan Layak Anak ini.

Evaluasi kegiatan Layak Anak di kota Surabaya bisa dilihat dari kerjasama yang terjalin baik antara pelaksana dalam mendukung tercapainya program layak anak, penyelesaian permasalahan cukup cepat, tepat, dan tidak berbelit, pencapaian hasil kegiatan sejauh ini cukup membantu pemerintah dalam menuntaskan kasus permasalahan anak, kegiatan Layak Anak cukup tersebar secara merata di seluruh Kota Surabaya, dan tentunya masyarakat sangat menerima adanya pelaksanaan kegiatan Layak Anak serta mereka juga memberikan respon yang positif untuk kegiatan ini

REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. *Sage Publications*.
- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42-50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of A Pilgrimage Tourism, Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1).
- Yesayabela, T. M., Prasetyo, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111-118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta
- Drs. AG. Subarsono, M.Si.,MA. 2015. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Cetakan VII. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn, N. William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak (KLA)

Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.

Fitriya, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak Melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377-390.

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 12(2), 252-267.

Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu. *Reformasi*, 10(1), 19-26.